



Penguatan Sistem Politik Indonesia guna Menghadapi Komunitas ASEAN Tahun 2015 dalam Rangka Ketahanan Nasional

Komunitas ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations Community*) telah disepakati oleh komunitas negara-negara anggota ASEAN mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. Komunitas ASEAN ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; Komunitas Ekonomi ASEAN; dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. ASEAN saat ini telah berubah dari organisasi tidak mengikat menjadi organisasi yang mengikat, berdasarkan hukum (*rule based capacity*), demokratis, mengedepankan perdamaian, *people-centre* dan ekonomi kawasan yang terintegrasi.

Bersamaan dengan berlakunya Komunitas ASEAN pada tahun 2015, Indonesia juga memulai pemerintahan

baru mulai dari jajaran DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu dan Pilpres tahun 2014. Demikian pula jajaran kabinet yang membantu presiden dan wakil presiden terpilih merupakan kabinet baru.

Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia selama ini memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam posisinya yang sangat penting dan strategis maupun dalam kepemimpinannya di ASEAN. Indonesia juga mendorong organisasi ASEAN menjadi satu-satunya organisasi di kawasan regional yang paling diakui eksistensinya di kawasan Asia Pasifik.

Dinamika negara-negara ASEAN saat ini, mengalami perkembangan yang pesat baik di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan, maupun kesejahteraan. Di tengah dinamika yang cepat berubah, ASEAN perlu memfokuskan organisasinya untuk menjalin kerjasama yang lebih erat sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat ASEAN.

Dalam menyelaraskan diri dengan Komunitas ASEAN di tahun 2015 mendatang, Indonesia telah melakukan penguatan sistem politik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi kepemimpinan nasional secara demokratis, serta sinkronisasi regulasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tentu masih diperlukan peningkatan sistem politik agar Indonesia dapat berdiri paling depan dalam ASEAN *Community* 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun yang penting bagi ASEAN dan kawasan Asia Tenggara. ASEAN terus berproses dari “*a mere Association*” menjadi sebuah “*Community*” Kawasan Asia Tenggara sendiri diharapkan akan lebih dinamis dan negara-negara di kawasan yang tergabung dalam ASEAN akan lebih terhubung satu sama lain dalam kerangka Komunitas ASEAN. Sebagai sebuah titik capaian penting dari proses panjang dalam perkembangan ASEAN dan kawasan Asia Tenggara, Komunitas ASEAN 2015 tentunya akan membawa berbagai dampak terhadap kawasan Asia Tenggara serta negara-negara di kawasan, khususnya yang tergabung dalam ASEAN.

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN 2015 dapat berdampak terhadap kondisi bangsa baik di bidang Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan.

a. Geografis

Dari perspektif kewilayahan (geografi) Komunitas ASEAN 2015 diharapkan akan lebih mengintegrasikan Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara dan lebih menghubungkan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Seperti digariskan dalam *Roadmap for ASEAN Community* dan *ASEAN Connectivity Master Plan*, pada saat terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 diharapkan terwujud pula *intra-regional connectivity* yang dibangun antara lain oleh meningkatnya perdagangan, investasi, pariwisata dan pembangunan. Pada saat itu pula diharapkan semakin berkurangnya “*development divide*” di antara negara-negara anggota ASEAN, dan semakin terintegrasinya antara *insular* dan *archipelagic Southeast Asia*.

b. Demografi

Dari perspektif kependudukan (demografi) Komunitas ASEAN 2015 diharapkan dapat memperkuat Indonesia sebagai *growth market*. Hal ini dimungkinkan mengingat jumlah penduduk dalam kategori *consuming-class* diperkirakan akan bertambah di tahun-tahun mendatang. Menurut *The Mckinsey Institute*, saat ini jumlah *consuming-class* Indonesia mencapai lebih dari 45 juta orang. Secara kolektif, kawasan Asia Tenggara juga akan menjadi *regional growth market* dengan jumlah *consuming-class* lebih dari 133 juta.

Tantangan penting lain bagi Indonesia dengan terwujudnya Komunitas ASEAN 2015, khususnya ASEAN *Economic Community*, adalah penyediaan SDM yang kompetitif. Salah satu elemen dari pilar ASEAN *Economic Community* adalah *free flow of skilled labours and talents*. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 237 juta, dan angkatan kerjanya harus bersaing dengan angkatan kerja dari negara-negara ASEAN lainnya. Menurut *WEF Global Competitiveness Report* tahun 2013, indeks daya saing angkatan kerja Singapura (5,61) dan Thailand (4,54) masih di atas Indonesia yang berada di urutan ketiga (4,9) di ASEAN

c. Sumber Kekayaan Alam

Dari perspektif sumber kekayaan alam (SKA), Komunitas ASEAN 2015 diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia mewujudkan *sustainable development*, yang bersandar antara lain pada pemanfaatan SDA secara seimbang dengan upaya pemeliharaan lingkungan. Sebagaimana digaris-bawahi dalam *Roadmap for ASEAN Community*, negara-negara ASEAN bersepakat untuk meningkatkan kerjasama regional meningkatkan kapasitas nasional dan regional dalam penanganan isu-isu lingkungan, termasuk *haze*, dan isu-isu yang terkait dengan *climate change* dan *ozone depleting substances*.

d. Ideologi

Meskipun di beberapa negara ASEAN paham komunisme masih hidup dan menjadi landasan ideologi pengelolaan berbangsa dan bernegara, Komunitas ASEAN 2015 tidak akan membawa ancaman ideologi. Seluruh negara ASEAN telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada prinsip-prinsip sebagaimana

tercantum dalam Piagam ASEAN, seperti prinsip-prinsip demokrasi, *rule of law*, *good governance*, serta pemajuan HAM dan kebebasan-kebebasan dasar. Namun demikian, tetap perlu diantisipasi kemungkinan menyebarnya radikalisme secara *trans-border* di kawasan atau yang berasal dari luar kawasan.

Pada gatra ideologi, diketahui bangsa Indonesia terdiri dari lima agama dan aliran-aliran kepercayaan. Perbedaan ideologi keagamaan yang ada harus disikapi sebagai kekayaan akan keberagaman dalam rangka menemukan kebersamaan tujuan, yakni kemakmuran bersama bangsa Indonesia. Setiap agama pada hakikatnya mengajarkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, mengajarkan kebersamaan untuk mencapai tujuan. Hal inilah secara tidak disadari merupakan bagian dari proses demokrasi pada sistem politik nasional Indonesia. Dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), merupakan bagian dari aspek kebebasan sipil (*Civil Liberties*). Jadi penguatan akan demokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan beragama bangsa Indonesia maupun sebaliknya.

e. Politik

Dari perspektif politik, diharapkan Komunitas ASEAN 2015 dapat memperkuat kemajuan demokrasi di tingkat regional dan di masing-masing negara anggota ASEAN. Sesuai ASEAN *Political and Security Community Blueprint*, penguatan demokrasi menjadi salah satu prioritas negara-negara ASEAN. Berbeda dari Uni Eropa, Komunitas ASEAN 2015 tidak dimaksudkan untuk membangun proses politik regional. Oleh karena itu, proses politik dalam kerangka Komunitas ASEAN akan terus

dalam *national boundary* masing-masing negara anggota ASEAN.

Pemajuan HAM diharapkan akan semakin meningkat dengan sudah berfungsinya ASEAN *Inter-Governmental Commission on Human Rights*. Namun demikian, pada saat Komunitas ASEAN 2015 terwujud, kawasan Asia Tenggara akan terus dihadapkan pada tantangan pemajuan dan perlindungan HAM bagi kelompok-kelompok minoritas, seperti Rohingya di Myanmar dan minoritas Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan.

Dampak terhadap kehadiran Komunitas ASEAN 2015, dalam gatra politik di Indonesia sangat besar. Hal ini dikembalikan pada kesiapan keseluruhan elemen bangsa Indonesia untuk menyikapinya. Bilamana terjadi ketidaksiapan baik secara struktural, institusional maupun personal, maka bukannya keuntungan yang didapat namun kehancuran sendi-sendi kehidupan fundamental rakyat banyak. Oleh karena itu diperlukan penguatan secara internal (kehidupan politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya dalam negeri) maupun penguatan secara eksternal (peran diplomasi dan hubungan luar negeri yang tangguh). Salah satunya adalah penguatan semangat untuk menjadi pelopor pergerakan setiap kesepakatan-kesepakatan yang telah diproklamkan bersama dalam konteks kepentingan nasional. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak akan kehilangan momentum dan mampu mengintervensi kepentingan Negara dalam ranah kerjasama antar Negara ASEAN.

f. Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, pada saat terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 di-

harapkan ekonomi kawasan akan semakin terintegrasi. Sesuai ASEAN *Economic Community Blueprint*, ekonomi ASEAN yang diharapkan adalah “*an open, outward-looking, inclusive, and market-driven economy*”. Kawasan Asia Tenggara juga diharapkan akan menjadi *a single market and production base*, sehingga ASEAN akan lebih dinamis dan kompetitif secara ekonomi.

Bagi Indonesia sendiri, ASEAN *Economic Community* (AEC) diharapkan akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Namun demikian, Indonesia akan bersaing tidak hanya dengan sesama negara anggota ASEAN tetapi juga di luar ASEAN seperti China dan India. Terlebih lagi dengan China, ASEAN telah membangun FTA. AEC juga akan menuntut Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing dan keunggulan komparatif, termasuk di sektor prioritas integrasi seperti produk-produk berbasis kayu, pertanian, perikanan dan minyak sawit. AEC juga menuntut perlunya peningkatan daya saing SDM secara berkelanjutan baik secara formal maupun informal.

g. Sosial Budaya

Dari perspektif sosial budaya (sosbud), melalui implementasi ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC) *Blueprint*, Komunitas ASEAN akan menjadi masyarakat yang *people-centred* dan *socially responsible* bagi tercapainya solidaritas dan kesatuan yang langgeng di antara negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia untuk terus membangun modalitas bagi partisipasi rakyatnya dalam proses masyarakat ASEAN sehingga proses tersebut *people-centred*. Hal



lain dalam kerangka ASCC yang penting bagi Indonesia adalah perlindungan terhadap pekerja migran. Dalam kaitan ini, akan menjadi kepentingan Indonesia untuk memastikan adanya kebijakan-kebijakan migrasi yang *fair* dan komprehensif serta perlindungan yang memadai bagi seluruh pekerja migran.

Pilar sosial budaya dalam komunitas ASEAN akan memberi dampak pada hubungan sosial antar satu negara dengan negara yang lain akan menjadi semakin meningkat. Dengan potensi negara Indonesia yang memiliki budaya daerahnya yang melimpah, berkualitas, dan menarik, hal ini dapat dijadikan obyek penghasil devisa dengan membuka obyek wisata. Dengan obyek wisata ini wisatawan dari negara-negara ASEAN akan tertarik untuk berwisata, dan menikmati budaya dunia. Ini merupakan suatu sumber penghasilan negara jangka panjang yang mesti dibanggakan dan dikembangkan. Industri pariwisata adalah salah satu peluang yang sangat strategis mengingat peran industri pariwisata adalah salah satu motor penggerak perekonomian.

h. Pertahanan Keamanan

Dari perspektif pertahanan dan keamanan (Hankam), Komunitas ASEAN 2015 diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan, yang pada gilirannya diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan keamanan masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Dengan banyaknya capaian dalam implementasi ASEAN *Political and Security Community* (APSC) *Blueprint*, terdapat harapan agar kawasan Asia Tenggara akan semakin aman dan stabil. Bidang-bidang APSC yang selama ini dinilai banyak mencapai kemajuan

mencakup antara lain *conflict prevention and confidence building measures, conflict resolution and pacific settlement of disputes, post-conflict peace building* dan *cooperation on disaster management and emergency response*.

Dengan memiliki ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* dan ASEAN *Coordinating Center for Humanitarian Assistance*, diharapkan ASEAN akan dapat semakin mengkonsolidasikan berbagai capaiannya dalam kerangka APSC. Namun demikian, tetap penting bagi ASEAN untuk mengantisipasi munculnya berbagai tantangan HANKAM yang bersumber dari konflik perbatasan atau ketegangan di Laut China Selatan serta dari ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan lintas batas.

Dengan memerhatikan kondisi lingkungan strategis tersebut, telah dilakukan kajian secara komprehensif bersama para pakar dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Komunitas ASEAN 2015 merupakan imperatif untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan regional dan internasional baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
2. Dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015, secara internal Indonesia masih memiliki persoalan mulai dari belum harmonis dan sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan, terbatasnya sarana prasarana, kualitas SDM yang belum memadai, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem politik nasional,

hingga belum optimalnya pen-dayagunaan potensi masyarakat, sehingga interaksi dengan masyarakat ASEAN masih kurang intensif dan bermakna bagi Indonesia.

3. Posisi Indonesia sebagai negara yang paling luas, paling banyak penduduknya dan sebagai *founding father* ASEAN menuntut Indonesia mampu mendorong kemakmuran rakyat dan menjadi *leader* di ASEAN.
4. Komunitas ASEAN akan menjadi peluang penting dan strategis apabila bangsa Indonesia mampu menyiapkan dan memanfaatkan kondisi astagatra dengan optimal dan tidak boleh lengah akan adanya potensi *liability*.
5. Menghadapi pemberlakuan Komunitas ASEAN 2015, diperlukan pemikiran kembali terhadap visi masa depan bangsa dan negara yang lebih konkret, sederhana, jelas dan sarat makna, agar arah pembangunan nasional lebih mudah direalisasikan baik oleh pemerintahan yang baru terpilih maupun seluruh komponen bangsa Indonesia.
6. Secara geostrategik, nilai Asia Tenggara meningkat secara signifikan di mata negara-negara besar seperti Amerika dan China, sehingga dalam diplomasi internasional, Indonesia harus meningkatkan konektivitas antar negara dengan mengedepankan *national view* dan juga *global view*.
7. Di samping wawasan kebangsaan (*inward looking*), perlu dilakukan

penguatan wawasan ke-ASEAN-an dan global (*outward looking*), sehingga Indonesia mampu memperkuat ketahanan nasional di berbagai tingkatan baik di dunia pendidikan, tataran penyelenggaraan negara, hingga segenap lapisan masyarakat

8. Melalui pilar-pilar komunitas ASEAN 2015, konsep “*dynamic equilibrium*” atau keseimbangan yang dinamis baik hubungan antar anggota ASEAN maupun dengan negara-negara di Asia-Pasifik, perlu dipahami bersama sehingga tercipta suatu situasi ko-eksistensi damai, dan sekaligus sebagai pondasi politik luar negeri yang bebas aktif sebagai cerminan strategi peradaban Indonesia di Asia Tenggara yang “stabil, aman dan sejahtera”.
9. Menghadapi pemberlakuan komunitas ASEAN 2015, bangsa Indonesia perlu melakukan pembenahan politik untuk kembali ke jati diri bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga tercapai suatu budaya dan ideologi politik, serta kemandirian ekonomi yang berkarakter ke-Indonesia-an.
10. Indonesia harus optimis, bersikap positif, dan menjadi penghela terdepan dalam menghadapi tantangan komunitas ASEAN 2015.

Dengan memperhatikan hasil analisis dalam rangka penguatan sistem politik Indonesia guna menghadapi komunitas ASEAN 2015, diperlukan suatu arah kebijakan dan langkah strategis melalui kajian ilmiah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan

Terwujudnya Sistem Politik Indonesia yang kuat dan dicapai melalui penguatan kelembagaan, kepemimpinan politik, regulasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem politik Indonesia serta mengoptimalkan pendayagunaan potensi masyarakat dalam menghadapi Komunitas ASEAN tahun 2015 .

2. Langkah Strategis

Indonesia harus segera menyusun langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara spesifik agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah strategis tersebut disusun secara terpadu di antara sektor mulai dari hulu hingga ke hilir dibawah koordinasi suatu Badan Khusus atau Kementerian Koordinator sesuai dengan bidangnya.

Langkah-langkah strategis setiap sektor kemudian dijabarkan kedalam tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya perbaikan maupun pengembangan infrastruktur sektor dalam rangka meningkatkan efisiensi guna mendorong kinerja yang dilakukan secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait. Koordinasi antar sektor dan instansi terkait, terutama dalam menyusun kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat serta harmonisasi (reformasi) kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan. Secara garis besar, langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan melakukan:

a. Penguatan Kelembagaan

- 1) Reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Pada hakekatnya *Blueprint* yang sudah disepakati juga merupakan program reformasi bersama yang dapat

dijadikan referensi bagi reformasi di Negara Anggota ASEAN termasuk Indonesia.

- 2) Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala.
 - 3) Pengembangan *political bureaucracy* yang responsif dan efektif, khususnya dalam mendukung *people connectivity*.
- ### b. Penguatan Kepemimpinan
- 1) Penguatan kepemimpinan politik yang mengedepankan keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme, termasuk dalam isu-isu luar negeri.
 - 2) Melembagakan mekanisme kaderisasi kepemimpinan secara gradual, transparan dan demokratis. Jika parpol melakukan kaderisasi maka parpol tidak harus mencalonkan artis atau selebriti sebagai caleg, tapi lebih mengutamakan kader internal parpol sendiri.
 - 3) Melembagakan mekanisme pemilihan pendahuluan bagi calon presiden oleh parpol, sehingga pemimpin yang diusung parpol benar-benar muncul dari bawah, teruji, memiliki rekam jejak yang baik, serta berintegritas.
 - 4) Melembagakan mekanisme uji publik bagi setiap calon pemimpin dan wakil rakyat. Mekanisme uji publik akan membatasi munculnya kandidat yang sekadar populer namun tidak memiliki pemahaman mengenai problematik bangsa.

- 5) Dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 diperlukan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki moralitas dan akuntabilitas individual, sosial, dan kelembagaan, melainkan juga moralitas dan akuntabilitas global.

c. Regulasi dan Deregulasi

- 1) Konsolidasi demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang lebih substantif yang berlandaskan pada *rules of law* dan penghormatan atas HAM dan *fundamental rights*.
- 2) Pembangunan budaya politik yang partisipatoris. Hal ini penting agar Indonesia dapat *take the lead* dalam mewujudkan *people-centred* Komunitas ASEAN. Dalam kaitan ini, penting pula dikembangkan komunikasi politik yang dialogis dan konstruktif.
- 3) Pengembangan partai politik yang aspiratif terhadap isu-isu kawasan negeri, khususnya ASEAN.
- 4) Pembangunan SDM aparat negara (*state apparatus*) yang profesional;
- 5) Pengembangan pendidikan politik.

d. Pendayagunaan Potensi Masyarakat

- 1) Penguatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian (melalui peningkatan peran dan posisi usaha skala menengah, kecil, dan usaha pada umumnya).
- 2) Penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta.
- 3) Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas pada masyarakat.

- 4) Peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengimplementasikan kebijakan guna mendukung Komunitas ASEAN 2015.
- 5) Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi maupun restrukturisasi industri, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas dan dalam rangka penguatan sistem politik Indonesia guna menghadapi komunitas ASEAN 2015, maka perlu dilaporkan beberapa rekomendasi/saran sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama Lembaga Legislatif melaksanakan :

- a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan *soft power* menghadapi Komunitas ASEAN 2015 melalui perubahan terhadap beberapa pasal yang saling tumpang tindih atau bersifat ambigu.
- b. Perumusan kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber daya di berbagai sektor yang mendukung ketahanan nasional dan berpihak kepada kepentingan nasional, termasuk perumusan "*ocean policy*".
- c. Pembenahan politik melalui penguatan kelembagaan, kepemimpinan, kebijakan atau regulasi dan partisipasi masyarakat untuk kembali ke jati diri bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga tercapai suatu budaya dan

ideologi politik, serta kemandirian ekonomi yang berkarakter ke-Indonesia-an.

2. Pemerintah :

- a. Membuat *grand design* untuk melaksanakan dan tahapan Komunitas ASEAN 2015 antar Kementerian/Lembaga.
- b. Membuat program hilirisasi industri sebagai upaya peningkatan daya saing industri dan kemandirian bangsa.
- c. Menyosialisasikan secara komprehensif mengenai program dan tahapan Komunitas ASEAN 2015 dan tindak-lanjutannya melalui media elektronik dan media cetak dengan melibatkan masyarakat secara luas.
- d. Melaksanakan penguatan jalur diplomasi untuk meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam integrasi ASEAN, peningkatan SDM Kementerian Luar Negeri, memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam peningkatan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
- e. Mengajak para penyelenggara negara dan pelaku usaha untuk

meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa melalui perubahan paradigma dan perilaku yang mengedepankan kepentingan nasional.

- f. Meningkatkan peran diplomasi luar negeri di kawasan yang lebih intensif, piawai, dan berwibawa sehingga mampu menghantarkan Indonesia sebagai *leader* dalam komunitas ASEAN.

3. Pemerintah bersama Partai Politik melaksanakan:

- a. Sosialisasi tentang upaya strategik dalam penguatan sistem politik Indonesia melalui media massa baik media cetak maupun elektronik.
- b. Memantapkan peran Indonesia dalam komunitas ASEAN dengan mengedepankan satu visi, satu misi, dan satu identitas dengan tetap mengedepankan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.
- c. Pendidikan dengan meningkatkan peran partai politik sebagai agen pengembangan sumberdaya kader politik dan pemimpin nasional dalam rangka menghadapi ASEAN *Community* 2015.

Tim Kajian "Penguatan Sistem Politik Indonesia guna Menghadapi Komunitas ASEAN Tahun 2015 dalam Rangka Ketahanan Nasional"

1. Irjen Pol Boy Salamuddin
2. Laksda TNI Djoko Teguh Wahojo
3. Prof. H. Dadan Wildan, M.Hum
4. Brigjen Pol Drs. Endaryoko, SH
5. Laksma TNI Dr. A. Yani Antariksa, SE, SH, MBA, MM
6. Tony Tri Bagus S, SH, M.Hum
7. Brigjen TNI Sakkan Tampubolon
8. Brigjen TNI H. Susanto
9. Kolonel Kes Agus Purwo W, SE, MM, MA
10. Dra. Ida Ayu Kade Dartini, MM
11. Chusnul Chotimah, S.Sos, M.Sc
12. Risminarni, SH, M.Sc
13. Letkol Laut (K) Sutanto, S.KM, M.AP, M.Sc
14. Sukarto, S.AP
15. Hasanuddin, S.AP
16. Rusma Sri Windrati